

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, masing-masing mempunyai indikator tersendiri dan mempunyai target capaian pada tahun 2015, namun dikarenakan SPM ini merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam bidang ketahanan pangan sehingga setiap tahun harus dievaluasi. Adapun indikator SPM bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. SPM PROVINSI (4 Indikator) :

No.	Jenis Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan	SPM		Capaian
		Indikator	Nilai (%)	
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan.	1. Penguatan Cadangan Pangan.	60	2018
2	Distribusi dan Akses Pangan.	2. Ketersediaan Informasi Pasokan Harga, dan akses pangan di daerah.	100	2018
3	Penganekaragaman dan keamanan pangan.	3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	80	2018
4	Penanganan Kerawanan Pangan.	4. Penanganan daerah rawan pangan.	60	2018

2. SPM KABUPATEN / KOTA (7 Indikator) :

No.	Jenis Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan	SPM		Capaian
		Indikator	Nilai (%)	
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan.	1. Ketersediaan energi dan protein per kapita.	90	2018
		2. Penguatan Cadangan Pangan.	60	
2	Distribusi dan Akses Pangan.	3. Ketersediaan Informasi Pasokan Harga, dan akses pangan di daerah.	90	2018
		4. Stabilitas harga dan pasokan pangan.	90	
3	Penganekaragaman dan keamanan pangan.	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	90	2018
		6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	80	
4	Penanganan Kerawanan Pangan.	7. Penanganan daerah rawan pangan.	60	2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013, target pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk masing-masing pelayanan dasar hanya sebatas tahun 2015, sedangkan untuk target 2017 dan 2018 menyesuaikan dengan target 2015 dan kondisi capaian tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian SPM bidang ketahanan pangan untuk tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

Target Pencapaian SPM Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun	
			2017	2018
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan cadangan pangan	60 %	60 %
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.	100 %	100 %
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.	80 %	80 %
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60 %	60 %

Sedangkan Realisasi Capaian SPM Ketahanan Pangan selama Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Capaian SPM Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian	
			2017	2018
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Penguatan cadangan pangan	48,5%	54,5%
2.	Distribusi dan Akses Pangan	2. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.	97,53%	97,53%
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.	63,04%	63,72%
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	3. Penanganan daerah rawan pangan	48,64	48,64

Berdasarkan Tabel 6 diatas bahwa capaian SPM Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan jenis pelayanan dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). **Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan.**

Pada indikator Penguatan Cadangan Pangan, target Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk Tingkat Provinsi yakni sebanyak 200 ton setara beras (sesuai dengan SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI). Dan untuk tahun 2015 Cadangan Pangan Pemerintah yang harus dicapai yaitu sebesar 60% dari 200 ton, atau sebesar **120** ton setara beras.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Adapun rincian pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2018.

No	Pengadaan CPPD	
	Tahun	Volume Satuan
1	2013	70 ton
2	2014	20 ton
3	2015	0 ton
4	2016	0 ton
5	2017	7 ton
6	2018	12 ton
	Jumlah	109 ton

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Cadangan Pangan selama 5 (lima) tahun terakhir baru mencapai **109** ton yaitu 70 ton (35%) pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 20 ton, sedangkan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak ada penambahan Cadangan Pangan. Untuk tahun 2017, telah dilaksanakan penambahan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebesar 7 ton beras, sedangkan pada tahun 2018 juga telah dilakukan penambahan cadangan pangan sebesar 12 ton, sehingga total pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai **109 ton** (sudah mencapai 54,5% $(109/120) \times 100$).

Hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2018 tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan, yakni 54,5% dari target 60%. Kekurangan 5,5%, akan tetap diupayakan pada tahun-tahun mendatang.

Penggunaan Cadangan Pangan dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak **47,137** kg beras untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Merangin sehingga stok cadangan pangan pemerintah Provinsi di Gudang Perum Bulog per 31 Desember 2018 sebesar **61.863 kg** beras.

2). Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan.

Indikator dalam pelayanan distribusi dan akses pangan yakni ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, capaian Tahun 2018 sebesar 97,53 % dari target 100%. Sebagai gambaran dalam capaian indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan yakni sebagai berikut :

- a. Target komoditas yang dipantau untuk harga dan pasokan yakni sebanyak 9 komoditas sedangkan untuk akses pangan hanya 7 komoditas dari sebanyak 9 komoditas yang ditargetkan. Nilai capaiannya 92,59%.
- b. Lokasi untuk melakukan pemantauan harga, pasokan dan akses pangan sesuai dengan yang ditargetkan yakni 1 lokasi untuk pemantauan harga dan pasokan, dan 7 lokasi untuk akses pangan. Nilai capaiannya 100%.
- c. Waktu pemantauan harga, pasokan dan akses pangan yakni selama 52 minggu dan ini sesuai dengan yang ditargetkan sehingga nilai capaiannya 100%.

Nilai capaian yakni jumlah capaian keseluruhan dibagi 3 sehingga rumusnya menjadi sebagai berikut : $(92,59\% + 100\% + 100\%) / 3 = 97,53\%$.

3). Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.

Indikator pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan untuk Tingkat Provinsi yaitu, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, yang mana target capaian sesuai SPM sebesar 80% sampel aman dikonsumsi pada Tahun 2018.

Capaian Tahun 2016 persentase sampel aman konsumsi sebesar 100% (Jumlah sampel 10 sampel, dan jumlah sampel aman sebanyak 10 sampel). Hasil ini belum mewakili untuk Provinsi Jambi, karena jumlah sampel terlalu sedikit.

Sedangkan capaian tahun 2017 sebesar 63% (Jumlah sampel 46 dan jumlah sampel aman sebanyak 29 sampel), hasil ini juga belum mewakili untuk Provinsi Jambi karena jumlah sampel yang diuji sedikit.

Berdasarkan uji petik yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 diperoleh hasil bahwa dari **102** sampel yang diuji terdapat 65 sampel tidak terdeteksi residu pestisida, sedangkan 37 sampel *terdeteksi adanya angka residu Pestisida* dibawah BMR, produk aman untuk dikonsumsi. Jika dibandingkan antara jumlah sampel aman (tidak terdeteksi residu pestisida) dengan total sampel yang diuji diperoleh angka capaian sebesar 63,72%. Sampel yang terdeteksi angka residu tersebut masih dibawah BMR (Batas Minimum Residu) dan termasuk kategori aman konsumsi.

Berdasarkan Capaian Tahun 2018 tersebut dapat dilihat bahwa capaian SPM indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Tahun 2018 belum sesuai target yang ditetapkan yakni 80%., namun sudah ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, baik jumlah sampel yang diuji maupun hasilnya.

Untuk itu di tahun-tahun mendatang masih banyak yang harus dilakukan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat, anak-anak sekolah mengenai pentingnya pangan yang aman untuk dikonsumsi, melakukan pengujian terhadap produk pangan baik pangan segar maupun pangan olahan. Jumlah sampel yang diuji juga perlu diperbanyak, mengingat semakin banyaknya sampel yang diuji akan semakin mendekati keakuratan data yang diperoleh.

4). Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk pelayanan penanganan daerah rawan pangan yaitu banyaknya desa rawan pangan yang dapat ditangani dibanding jumlah desa yang mengalami kerawanan pangan.

Di Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah dilaksanakan Kegiatan Penanganan Daerah / Desa yang mengalami Kerawanan Pangan, namun sampai dengan saat ini belum optimal dalam penanganannya dikarenakan keterbatasan dana yang ada. Sebagai gambaran bahwa hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2016 yakni dari 212 desa yang beresiko rawan pangan (data tahun 2009) sampai Tahun 2015 baru 87 desa yang telah diberdayakan dalam bentuk Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan pada tahun 2016 ada penambahan 10 desa tahap persiapan (masuk dalam kawasan mandiri pangan), sehingga sampai dengan Tahun 2016 telah diberdayakan sebanyak 97 desa rawan pangan. Pada tahun 2017 melalui dana APBD Provinsi Jambi telah dibentuk 4 (empat) desa Mandiri Pangan baru, sehingga secara keseluruhan telah diberdayakan desa rawan pangan sebanyak 101 desa dari 212 desa rawan pangan (data 2009). Dengan demikian capaian SPM dengan indikator penanganan daerah rawan pangan telah tercapai sebesar 48,64%, masih belum sesuai yang ditargetkan (60%). Diupayakan tahun depan ada penambahan desa mandiri pangan baru.